

**MATRIK RENCANA CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022**

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TRIWULAN II

MATRIK 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD & Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2021	Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2022					Target Realisasi Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022	Target Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)	Keterangan	
						Target	Target s.d.						Kendala	Tindak Lanjut / Rencana Tindak Lanjut
							Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	65.17	70.35	107.95	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	70,35 (TW1)	108.63	BKKBN (DALLAP) sudah tidak digunakan lagi sejak awal Tahun 2022, data yang digunakan merupakan Tahun 2021	Aplikasi pengganti DALAP BKKBN yaitu New SIGA dan PK21 tetapi belum siap digunakan, menunggu kesiapan BKKBN
1) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
	a. <i>Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang</i>	%	27.70	0.00	0.00	19.44	18.50	19.44	19.44	19.44	19,44 (TW1)	100.00	Masih sedikit kabupaten/kota yang menyusun GDPK dikarenakan kurangnya anggaran dari kabupaten/kota dan harus melaksanakan rapat secara kontinu	Memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan GDPK. Kabupaten/kota yang sudah menyusun GDPK yaitu Kota Semarang, Kab. Klaten, Kota Tegal, Kab. Blora, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kab. Kebumen, Kota Surakarta
	b. <i>Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)</i>	%	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25 (TW1)	100.00	-	-
2) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
	a. <i>Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</i>	%	30	28.42	94.73	29.5	29.5	28.42	29.5	29.5	28,42 (TW1)	96.34	Statistik rutin BKKBN (DALLAP) sudah tidak digunakan lagi. sejak awal Tahun 2022. Data Realisasi yang digunakan merupakan Tahun 2021	Sebagai pengganti DALAP BKKBN yaitu New SIGA dan PK21 tetapi belum siap digunakan
	b. <i>Unmetneed KB</i>	%	12.76	14.29	89.29	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	14,29 (TW1)	90.20	Tahun 2021 masih terkendala beberapa faskes (Rumah sakit dan klinik) yang belum bisa melayani pelayanan KB secara masal terutama KB MKJP	Faskes mulai membuka kembali pelayanan KB dan akan di monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Sebagai pengganti DALAP BKKBN yaitu New SIGA dan PK21 tetapi belum siap digunakan. Data realisasi yang digunakan merupakan data tahun 2021
2	Indeks pembangunan keluarga	Angka	56.29	0.00	0.00	54.38	54.38	54.38	54.38	54.38	56,10 (TW1)	103.16	-	Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Jawa Tengah Tahun 2021
1) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														

a.	<i>Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan</i>	%	96.30	114.46	118.86	96.25	95.50	96.25	96.25	96.25	114,46 (TW1)	118.92	BKKBN (DALLAP) sudah tidak digunakan lagi. sejak awal Tahun 2022. Data Realisasi merupakan realisasi Tahun 2021. Kelompok yang tidak aktif dihilangkan oleh oleh BKKBN sehingga angka absolut	Sebagai pengganti DALAP BKKBN yaitu New SIGA dan PK21 tetapi belum siap digunakan.
b.	<i>Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan</i>	%	91	112.61	123.75	90.5	90	90.5	90.5	90.5	112,61 (TW1)	124.43	BKKBN (DALLAP) sudah tidak digunakan lagi. sejak awal Tahun 2022. Data merupakan Realisasi Tahun 2021. Kelompok yang tidak aktif dihilangkan oleh oleh BKKBN sehingga angka absolut nya	Sebagai pengganti DALAP BKKBN yaitu New SIGA dan PK21 tetapi belum siap digunakan
c.	<i>Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota</i>	%	25	0	0	25	25	25	25	25	25 (TW1)	100	-	-

Keterangan & cara pengisian:

1. Mohon dapat melengkapi rencana capaian kinerja

2. Kolom Keterangan (**kolom 14**) diisi dengan **update/info terkini** tentang: kegiatan cascading pendukung IKU & indikator program & hal² lain yg perlu dijelaskan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Semarang, April 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

19681124 199310 2 001

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD & Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2021	Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2022					Target Realisasi Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2022	Target Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2022 (%)	Keterangan	
						Target	Target s.d.						Kendala	Tindak Lanjut / Rencana Tindak Lanjut
							Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90.00	0.00	0.00	80.00	70.00	70.00	80.00	80.00	70 (TW1)	87.50	Pegawai yang mengurus kebijakan PUG Kabupaten/Kota sering mutasi	Sosialisasi dan advokasi kepada kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan PUG di kabupaten/kota. Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sudah memiliki Perda, Pergub, Perwali maupun Perbup terkait PUG sebanyak 25 Kabupaten/Kota dan Provinsi
1) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
a.	<i>Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan</i>	%	6.84	0.00	0.00	6.42	2.30	3.50	4.60	6.42	2,32 (TW1)	36.14	Kendala Pelatihan PPEP yaitu pemasaran dan modal sehingga pelatihan 1 hari belum bisa menciptakan wirausaha baru	Perlu pelatihan secara berkelanjutan dan kerjasama antar stakeholder terkait pengembangan pelatihan untuk menciptakan wirausaha baru yang lebih mapan
2	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	62.85	62.85	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62,85 (TW1)	104.75	13 Kabupaten/Kota masih mendapat peringkat KLA tingkat Pratama. Kab. Kudus mengalami penurunan peringkat menjadi Pratama karena meningkatkan kasus Covid sehingga menjadi faktor penurunan peringkat	Advokasi dan fasilitasi kabupaten/kota dalam penilaian KLA
1) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
a.	<i>Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama</i>	%	100.00	100.00	100.00	94.28	94.28	94.28	94.28	94.28	100 (TW1)	106.17	Pada Tahun 2021 ada kabupaten yang mengalami penurunan peringkat	35 Kabupaten/Kota sudah mendapat penghargaan KLA dengan berbagai kategori
b.	<i>Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)</i>	%	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	-	Kabupaten/kota mengisi indikator KLA untuk penilaian pada TW 2 dan TW 3
2) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
a.	<i>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender</i>	%	40.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	63,88 (TW1)	182.51	Masih perlunya identifikasi layanan puspaga yang aktif di Kabupaten/Kota	Sampai saat ini layanan puspaga di Kabupaten/Kota berdasarkan SK Kepala Daerah dan Kepala Dinas sejumlah 23 Kabupaten/Kota, tetapi keaktifannya harus diidentifikasi lagi
b.	<i>Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak</i>	%	40.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	63,88 (TW1)	182.51	Perlunya identifikasi layanan puspaga yang aktif di Kabupaten/Kota	Sampai saat ini layanan puspaga di Kabupaten/Kota berdasarkan SK Kepala Daerah dan Kepala Dinas sejumlah 23 Kabupaten/Kota tetapi keaktifan harus diidentifikasi lagi
3) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														

	a)	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15 (TW1)	100.00	-	-
3		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100.000	8.02	8.35	96.05	8.05	1.10	4.30	6.80	8.05	1,08 (TW1)	745.37	Masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakibatkan banyak faktor	Melakukan kampanye Jo Kawin Bocah dan Pembelajaran Keluarga melalui Puspaga dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
1) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
	a.	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	per 100.000	5.64	5.11	110.37	5.70	0.80	1.30	3.40	5.70	0,79 (TW1)	721.52	Masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakibatkan banyak faktor	Melakukan kampanye Jo Kawin Bocah dan Pembelajaran Keluarga melalui Puspaga dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
	b.	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	15.00	0.00	0.00	15.00	10.00	13.00	15.00	15.00	15 (TW1)	100.00	-	-
2) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
	a.	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000	12.36	11.02	112.16	12.46	1.25	4.21	7.32	12.46	1,23 (TW1)	1,013.01	Masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakibatkan banyak faktor	Melakukan kampanye Jo Kawin Bocah dan Pembelajaran Keluarga melalui Puspaga dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak
	b.	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	15.00	0.00	0.00	15.00	5.00	10.00	15.00	15.00	5 (TW1)	33.33	-	-

Keterangan & cara pengisian:

- Mohon dapat melengkapi rencana capaian kinerja
- Kolom Keterangan (**kolom 14**) diisi dengan **update/info terkini** tentang: kegiatan cascading pendukung IKU & indikator program & hal² lain yg perlu dijelaskan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Semarang, April 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
19681124 199310 2 001